



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2022/Periodik - 2021)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA  
**UNIT KERJA** : WAKIL PIMPINAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : Kartika Wirjoatmodjo
2. Jabatan : WAKIL MENTERI BUMN II
3. NHK : 400421

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 36.998.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 406 m2/270 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 11.900.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 725 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 23.900.000.000
3. Tanah Seluas 1985 m2 di KAB / KOTA MALANG, WARISAN Rp. 1.198.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 3.496.375.000

1. MOBIL, TOYOTA VELLFIRE 2.5 G AT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 630.000.000
2. MOBIL, BMW X5 4011 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 1.312.500.000
3. MOBIL, SUZUKI JIMNY Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 306.250.000
4. MOBIL, MERCEDES BENZ E300 AT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 1.131.375.000
5. LAINNYA, SEPEDA TYRELL FX 105 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 41.250.000
6. LAINNYA, SEPEDA BROMPTON M6L Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 37.500.000
7. LAINNYA, SEPEDA BROMPTON AUTOFAME LG 18 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 37.500.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 1.346.343.750



D. SURAT BERHARGA	Rp.	18.103.133.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	41.402.732.945
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	101.346.584.695
III. HUTANG	Rp.	287.854.498
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	101.058.730.197

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.